

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. ANALISIS DATA

4.1.1. Perkembangan Kesempatan Kerja

Perkembangan kesempatan kerja dapat dilihat dari tabel 4.1. dimana dilihat dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 4.1. Perkembangan Kesempatan Kerja Nasional

Tahun	Angkatan Kerja	Angkatan Kerja Yang Bekerja	Pertumbuhan Angkatan kerja yang bekerja (dalam persen)	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (dalam persen)	Tingkat kesempatan kerja (dalam persen)
1990	77,802.00	75,851.00	2,63	57,3	97,49
1991	78,456.00	76,423.00	0,75	57,1	97,41
1992	80,704.00	78.518.00	2,74	57,3	97,29
1993	81,446.00	79.200.00	0,87	56,6	97,24
1994	85,777.00	82,039.00	3,58	58,0	97,64
1995	86,361.00	80,110.00	-2,35	56,6	92,76
1996	90,110.00	85,702.00	6,98	66,9	95,11
1997	91,325.00	87,050.00	1,57	66,3	95,32
1998	92,735.00	87,672.00	0,72	66,91	94,54
1999	94,847.00	88,817.00	1,31	67,22	93,64
2000	95,651.00	89,838.00	1,14	67,76	93,92
2001	98,812.00	90,807.00	1,07	68,60	91,90
2002	100,779.00	91,647.00	0,93	67,76	90,94
2003	100,316.00	90,785.00	-0,94	67,86	90,50
2004	103,973.00	93,722.00	3,24	67,54	90,14
2005	105,802.00	94,948.00	1,31	68,02	89,74

Sumber : Statistik tenaga kerja, BPS diolah

Perkembangan kesempatan kerja dilihat dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja setiap tahunnya mengalami fluktuasi hal ini dilihat dari

pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja namun rata-rata setiap tahunnya pada periode 1990 sampai 2005 penambahan angkatan kerja mengalami penurunan setiap tahunnya hal tersebut menunjukkan kesempatan kerja mengalami penurunan. Kesempatan kerja yang juga ditunjukkan pada nilai tingkat kesempatan kerja pada tabel 4.1. dimana setiap tahunnya tingkat kesempatan kerja mengalami penurunan.

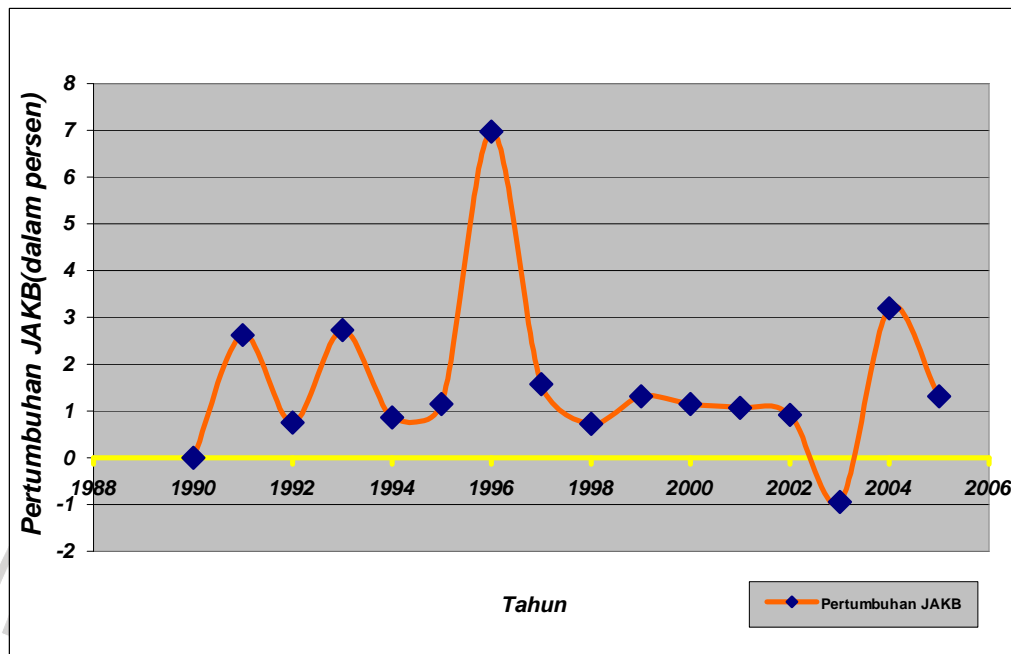
Sebelum krisis moneter pada periode tahun 1990 sampai dengan periode 1996, mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 1991 angkatan kerja yang bekerja bertambah sebesar 2,63 persen, namun tahun-tahun selanjutnya jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan jumlahnya hal ini dilihat dari persentasenya yang semakin menurun namun hal tersebut masih dianggap stabil karena jumlah pengangguran masih sedikit dan tingkat kesempatan kerja rata-rata masih 97,5 persen artinya hanya 2,5 persen yang menganggur dari jumlah tenaga kerja.

Tahun 1996 terjadi penambahan angkatan kerja yang bekerja yaitu sebanyak 6,98 persen, hal ini menunjukkan sebelum krisis moneter peningkatan kesempatan kerja terjadi pada tahun 1996. Peningkatan kesempatan kerja pada tahun 1996 mencapai pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 6,98 persen hal ini disebabkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu stabil, **Laporan Tahunan Bank Indonesia** (1995/1996) menyebutkan perekonomian pada tahun 1996 didukung oleh kekuatan investasi swasta yang bertambah dimana mencapai 12% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,82 persen. Membaiknya iklim investasi

dan pertumbuhan konsumsi swasta ini mendorong bertambahnya lapangan kerja bagi masyarakat.

Peningkatan kesempatan kerja pada tahun 1996 hanya sementara, pada tahun 1997 yaitu dimulainya krisis moneter terjadi penurunan tingkat kesempatan kerja yang ditunjukkan penurunan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1,57 persen dan tahun selanjutnya 1998 pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja turun sebesar 0,72 persen dibandingkan dengan tahun 1996 sebelum terjadinya krisis moneter penambahan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 6,98 persen.

Sejak terjadinya krisis ekonomi, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia belum menggembirakan, karena pengangguran masih selalu meningkat jumlahnya. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang belum mendukung penciptaan kesempatan kerja, tingkat keamanan dalam negeri yang tidak stabil dan sebab-sebab lain. Kesemuanya itu berdampak enggannya para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Belum lagi ditambah banyaknya perusahaan asing yang selama ini sudah beroperasi di Indonesia merelokasikan di negara-negara tetangga dengan berbagai alasan, serta banyaknya industri tekstil, garmen, sepatu dan lainnya yang menutup usahanya yang disebabkan rendahnya daya saing baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini semua menambah jumlah penganggur di Indonesia. (Warta Ketenagakerjaan Depnakertrans, 2003)



Gambar.4.1. Perkembangan Kesempatan Kerja Nasional Periode 1990-2005
(Sumber: Badan Pusat Statistika, data diolah)

Perkembangan kesempatan kerja pasca krisis moneter juga tidak mengalami perbaikan yang berarti walaupun pada tahun 1999 mengalami kenaikan pertambahan angkatan kerja yang bekerja namun pertumbuhannya hanya 1,31 persen dari 0,72 persen. penurunan terbesar kesempatan kerja setelah pasca krisis moneter yaitu terjadi pada 2003. Perekonomian Indonesia pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10 persen, namun sayangnya pertumbuhan sebesar itu tidak berdampak positif penciptaan kesempatan kerja baru, karena penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar -0,94 persen. Dengan demikian penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Menurunnya jumlah penduduk yang bekerja, salah satu sebabnya adalah, menurunnya jumlah angkatan kerja dari 100,78 juta tahun 2002 menjadi 100,32 juta periode tahun 2003, atau rata-rata mengalami pertumbuhan minus sebesar -0,46 persen.

Penurunan jumlah angkatan kerja ini, terutama di perkotaan dan berjenis kelamin perempuan. Penurunan di perkotaan mencapai sebesar - 2,66 persen dan yang berjenis kelamin perempuan menurun sebesar -5,31 persen. Penurunan jumlah angkatan kerja tahun 2003 diperkirakan karena keluar dari pasar kerja, baik melanjutkan sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Angkatan kerja yang mengalami penurunan yang berpendidikan SD ke bawah dan diploma sehingga berkolerasi positif bila masuk bukan angkatan kerja. (**Warta Ketenagakerjaan Depnakertrans, 2004**)

4.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan perkataan lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi. (**Muana Nanga, 2001:279**)

Disebutkan dalam **Rencana Kerja Tenaga Kerja Nasional 2004-2009 (2007)** salah satu cara untuk menciptakan kesempatan kerja adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan krusial untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga "ramah" terhadap ketenagakerjaan (*employment - friendly - growth*).

Tabel 4.2. Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhan Ekonomi

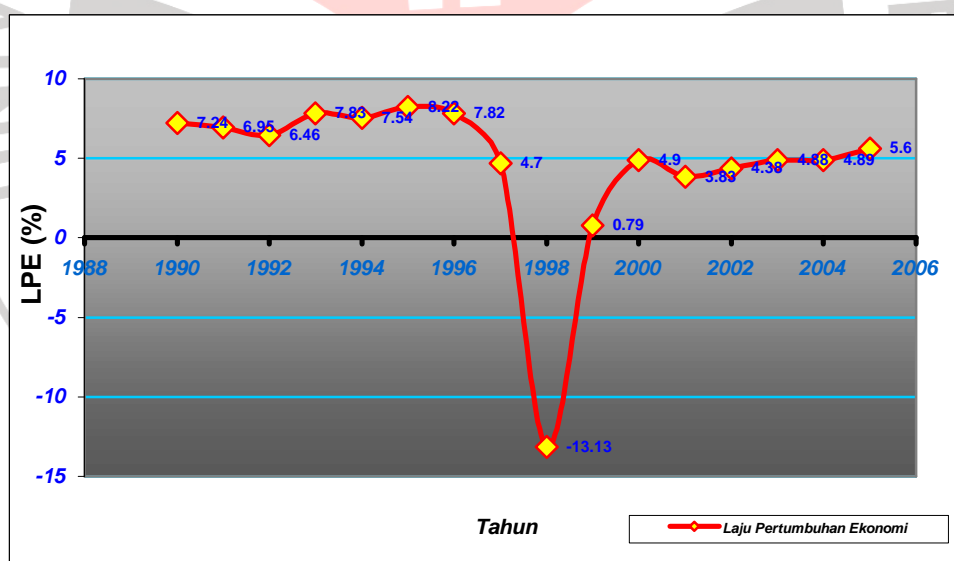
Tahun	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	
	PDB Miliar Rupiah	Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)
1990	875.024,96	7,24
1991	936.400,36	6,95
1992	999.720,93	6,46
1993	1.151.729,48	7,83
1994	1.238.569,55	7,54
1995	1.340.380,41	8,22
1996	1.445.173,48	7,82
1997	1.513.094,89	4,70
1998	1.314.475,07	-13,13
1999	1.324.874,14	0,79
2000	1.389.770,30	4,90
2001	1.442.984,60	3,83
2002	1.506.124,40	4,38
2003	1.579.559,00	4,88
2004	1.656.825,70	4,89
2005	1.749.546,90	5,60

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistika

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Nasional sebelum krisis moneter periode 1990 sampai 1996 cukup konsisten walaupun berfluktuatif hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi ekonomi yang cukup stabil, dimana posisi terendah pertumbuhan ekonomi sebelum krisis moneter yaitu pada tahun 1992 yaitu sebesar 6,46 persen dengan nilai PDB Rp. 999.720,93 miliar sebesar

Penurunan Laju pertumbuhan pada tahun 1992 disebabkan Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, selain disebabkan oleh pengaruh kemarau panjang yang telah mengakibatkan rendahnya pertumbuhan produksi hasil pertanian, juga disebabkan oleh kebijaksanaan pengendalian moneter yang telah memperlambat pertumbuhan permintaan dalam negeri, yang dalam tahun sebelumnya merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. **(Nota Keuangan dan RAPBN 1992/1993)**

Posisi tertinggi pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi dicapai pada tahun 1995 yaitu sebesar 8,22 persen dengan nilai PDB Rp. 1.340.380,41 miliar. Tahun 1995 situasi makro Indonesia memperlihatkan perkembangan yang cukup mantap. Upaya menjaga keseimbangan yang cukup mantap. Upaya menjaga keseimbangan makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten dan berhati-hati telah dapat memelihara iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi meningkat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya saat itu posisi Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki perekonomian yang paling dinamis di dunia menjadi mantap, kekuatan yang mendukung pertumbuhan tersebut berasal dari permintaan domestik yang menguat terutama sektor investasi swasta. **(Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1995/1996)**



Gambar 4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1990-2005
(Sumber: Statistika Indonesia BPS, data diolah)

Awal krisis moneter pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4,70 persen dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1996 sebesar 7,82 persen. Krisis nilai tukar telah menurunkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam sejak bulan Juli 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun tersebut mencapai penurunan sebesar 4,70 persen dari tahun 1996 sebesar 7,8 persen dan tahun 1998 tercatat pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang negative sebesar -13,13 persen. Merosotnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah kondisi usaha sektor swasta yang makin melambat kinerjanya. Kelambatan ini terjadi antara lain karena sulitnya memperoleh bahan baku impor yang terkait dengan tidak diterimanya LC Indonesia dan beban pembayaran hutang luar negeri yang semakin membengkak sejalan dengan melemahnya rupiah serta semakin tingginya tingkat bunga bank. Kerusuhan yang melanda beberapa kota dalam bulan Mei 1998 diperkirakan akan semakin melambatkan kinerja swasta yang pada giliran selanjutnya menurunkan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi. **(BAPPENAS, 2000)**

Meskipun belum lancar, kegiatan ekonomi mulai berjalan kembali di tahun 1999 dan hasilnya mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,79%. Kegiatan perekonomian mulai bergerak lebih cepat di tahun 2000, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,90%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 4,90% turut pula menyumbang bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2000 menurun menjadi 6,1 persen angkatan kerja dari 6,3 persen angkatan kerja pada tahun 1999. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp 6,3 juta atau setara dengan US\$ 756. Namun pada tahun 2001, angka pertumbuhan ekonomi tersebut turun menjadi 3,32% dan

tahun 2003 pertumbuhan ekonomi sekitar 4,89%. Kurs rupiah yang turun menjadi Rp 10.400 turut berpengaruh terhadap turunnya pertumbuhan masing-masing lapangan usaha.**(BAPPENAS, 2003)**

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 2004 mencapai 4,89 persen dipandang masih moderat dibandingkan dengan masa-masa sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif, seperti investasi dan ekspor masih harus lebih dioptimalkan. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam tahun 2004 belum dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja baru yang bertambah Sekitar 2,5 juta orang per tahunnya. Oleh karena itu, disamping upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, perlu juga diupayakan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik yaitu yang dapat menyerap lebih besar tenaga kerja, dan dengan demikian sekaligus dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.**(Nota Keuangan, 2005)**

Perekonomian Indonesia tahun 2005 diawali dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatnya kepercayaan bisnis dan permintaan investasi dengan pesat. Dalam tahun 2005, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan banyak kalangan dan lembaga-lembaga internasional sebelumnya. Ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 ditandai dengan pertumbuhan positif pada hampir semua lapangan usaha.**(Nota Keuangan, 2006)**

4.1.3. Perkembangan Upah

Upah Minimum Nasional (UMN) tergambar pada tabel 4.3 yang merupakan hasil dari penjumlahan rata-rata seluruh Upah Minimum Propinsi dari 26 propinsi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (Berita Resmi Statistik Indonesia No. *No.13/Th.V/1 Maret 2002*) Upah Minimum Nasional adalah hasil dari rata-rata upah minimum propinsi disetiap propinsi Indonesia.

Dalam perhitungan rata-rata UMP yaitu menggunakan 26 propinsi dari 31 propinsi di Indonesia. Penetapan jumlah propinsi menjadi 26 karena perkembangannya jumlah propinsi Indonesia berubah yaitu sebelum krisis jumlah propinsi Indonesia terdapat 27 propinsi kemudian setelah krisis moneter Timor-Timur keluar dari Indonesia namun keluarnya Timor-Timur menambah jumlah propinsi Indonesia pada tahun 2001 menjadi 30 propinsi dan pada tahun 2005 menjadi 31 propinsi. Oleh karena itu maka diambil 26 propinsi yang kedudukannya tidak berubah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari tahun 1990-2005 .

Dari tabel 4.3 terlihat setiap tahun upah mengalami kenaikan hal ini dikarenakan disesuaikan dengan standar kehidupan para pekerja di Indonesia yang setiap waktunya mengalami penambahan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Sebelum krisis ekonomi dari tahun 1990-1997 kenaikan upah minimum berfluktuasi namun kenaikan upah yang paling tertinggi adalah pada tahun 1995 yaitu sebesar 41,44 persen dari tahun 1994 yang kenaikannya sebesar 30,75

persen. Menurut **Warta ketenagakerjaan (Depnakertrans, 1999)**, tahun 1995 kenaikan upah minimum lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya hal ini karena kondisi perusahaan Indonesia sangatlah membaik didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,22 persen dan laju inflasi yang terkendali. Kondisi perusahaan Indonesia yang membaik pada tahun 1995 ditandai oleh meningkatnya produktivitas perusahaan secara nasional sehingga pemerintah menganggap tepat jika upah dinaikkan 41,44 persen dari tahun sebelumnya.

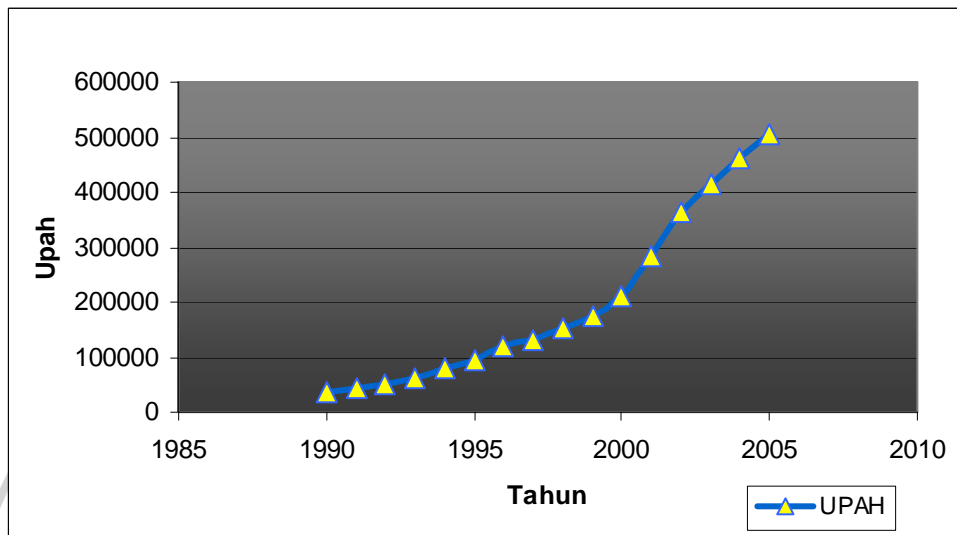
Tabel 4.3. Upah Minimum Nasional Periode 1990 -2005

Tahun	Rata-Rata Upah Minimum Propinsi (UMP) (Rupiah)	Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen)
1990	37751	29,40
1991	45171	27,44
1992	50808	11,75
1993	60575	17,68
1994	79675	30,75
1995	94650	41,44
1996	119401	17,64
1997	130827.4	10,44
1998	151625	15,00
1999	174471.2	15,65
2000	211866.7	25,48
2001	284019.2	36,35
2002	364426.7	18,09
2003	415632.8	14,33
2004	460059.2	10,55
2005	506192.3	10,73

Sumber : Direktorat Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan, Depnakertrans Indonesia

Kemudian tahun 1997-1998 upah minimum kenaikannya mengalami penurunan hanya meningkat 10,44 dan meningkat pada tahun 1998 yang hanya mencapai 15 persen. Penurunan ini dikarenakan adanya krisis ekonomi dengan ditandai adanya kelesuan ekonomi diberbagai sektor sehingga banyak perusahaan

yang terpaksa mem-PHK pekerjanya sehingga menambah panjang pengangguran. (Warta ketenagakerjaan, Depnakertans: 2000)



Gambar 4.3. Perkembangan Upah Minimum Nasional Periode 1990-2005

(sumber : Direktorat Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan, Depnakertrans Indonesia)

Paska krisis moneter dimulai periode 1999-2005 perekonomian mulai membaik dan tingkat inflasi mulai menunjukkan penurunan dengan kondisi tersebut upah pun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2000, 2001, berturut-turut kenaikan upah sebesar 25, 48 persen dan 36,35 persen. Namun tahun 2003 kenaikannya mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 18,09 Persen dan diikuti tahun-tahun selanjutnya upah mengalami penurunan. Sampai tahun 2005 posisi upah kenaikannya hanya mencapai 10,73 persen. Penurunan secara berturut-turut dari tahun 2003 sampai 2005 ini dikarenakan situasi perekonomian yang kurang membaik, naiknya harga-harga akibat kenaikan BBM, adanya bencana alam yang melanda di Indonesia dan juga disebabkan oleh penyesuaian harga BBM dalam negeri pada bulan Maret dan Oktober 2005. Kenaikan BBM

sangat mempengaruhi tingkat upah, dimana dengan naiknya BBM baban perusahaan semakin bertambah kenaikan Upah mengalami penurunan.(Warta ketenagakerjaan, Depnakertrans: 2005)

4.2. HASIL PENELITIAN

4.2.1. Pengujian Model Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan metode variabel Instrumental yaitu dimana memasukan *Predicted Value* dari hasil estimasi LPE dan PMDN ke dalam estimasi ke persamaan estimasi akhir. Dalam penelitian ini menggunakan Eviews 5.0 hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Table 4.4. Pengujian Model Penelitian

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	292461.5	76723.64	3.811883	0.0022
LPE	-47009.93	16876.61	-2.785507	0.0155
UPAH	0.037892	0.004061	9.329846	0.0000
R-squared	0.870814	Mean dependent var		85820.56
Adjusted R-squared	0.850939	S.D. dependent var		6277.200
S.E. of regression	2423.529	Akaike info criterion		18.59120
Sum squared resid	76355418	Schwarz criterion		18.73606
Log likelihood	-145.7296	F-statistic		43.81491
Durbin-Watson stat	1.067901	Prob(F-statistic)		0.000002

Sumber : Pengujian model Eviews

Diperoleh persamaan model regresi berganda sebagai berikut :

$$KK = 292461,5 - 4700993lpe + 0,037892upah$$

$$t = (3.811883) \quad (-2.785507) \quad (9.329846)$$

$$R^2 = 0.870814$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.870814 atau 87,0814%.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Multikolinearitas (Multicollinearity Test)

Untuk menguji multikolinearitas di dalam model penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode pengujian.

1. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen.

Table 4.5. Matrix Korelasi Antarvariabel Independen

Variabel Independen	LPE	UPAH
LPE	1.000000	0.218646
UPAH	0.218646	1.000000

Sumber: Pengujian model eviews

Dari matrix tersebut tampak bahwa antar variabel LPE dan Upah tidak memiliki koefisien yang cukup besar melainkan hubungan antar variabel LPE dan Upah berkorelasi lemah yaitu sebesar 0,23, sehingga kesimpulannya dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

2. Regresi Auxiliary

Pengujian regresi auxiliary, menguji multikolinearitas hanya dengan melihat hubungan secara individual anatara satu variabel independen dengan satu variabel independen lainnya. Dalam regresi ini setiap koefisien determinasi (R^2) dari regresi auxiliary digunakan untuk menghitung distribusi F dan kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah model mengandung multikolinearitas atau tidak. Keputusan ada tidaknya unsur multikolinearitas dalam model ini adalah jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi α dan derajat kebebasan tertentu

maka dapat disimpulkan mengandung unsur multikolinearitas.(Agus Widarjono, 2005:137)

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan $df=16-2=14$ maka $T_{tabel} = 1,771$. Maka dapat disimpulkan dalam tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6. Perbandingan Nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

F_{hitung}	Dibanding $F_{tabel} = 3,81$	Kesimpulan
$F_{lpe} = 0,0702$	Lebih kecil	Tidak ada korelasi antara LPE dengan UPAH/ tidak ada multikolinearitas
$F_{upah} = 0,0702$	Lebih kecil	Tidak ada korelasi antara Upah dengan LPE/tidak ada multikolinearitas

Sumber : Pengujian Estimasi Eviews

Dari tabel 4.6. dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Dimana masing-masing variabel independen tidak mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya.

3. Pengujian regresi Parsial

Berdasarkan pengujian regresi secara parsial diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.7. Pengujian Regresi Parsial

Variabel	R ² regresi parsial	Kriteria	R ² estimasi	Kesimpulan
LPE	0,047806	Lebih kecil	0,870814	Tidak terdapat multikolinearitas
UPAH	0,047806	Lebih kecil	0,870814	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : Pengujian regresi parsial Eviews

Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial diperoleh data pada tabel 4.7 dalam model estimasi secara umum tidak terdapat multikolinearitas karena nilai R² regresi parsial < R² estimasi.

4.2.2.2. Uji Heterokedastisitas (Heterokedasticity Test)

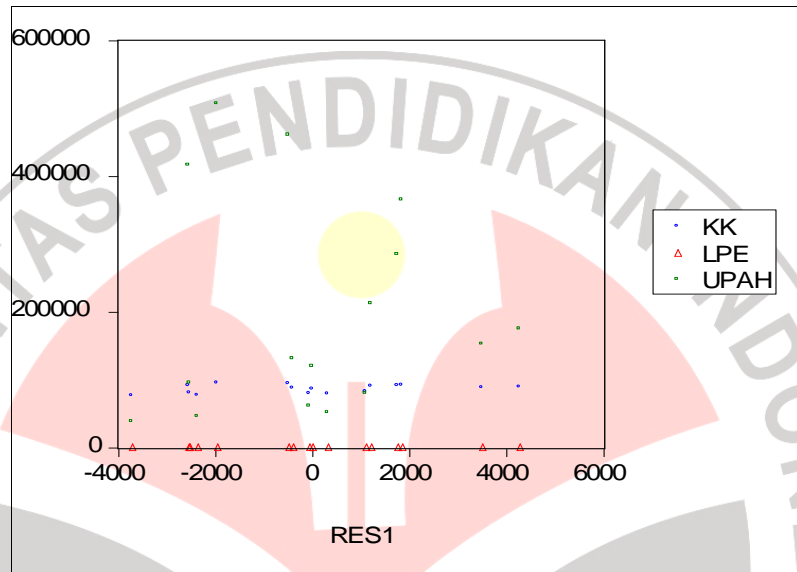
Uji asumsi klasik yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah uji heteroskedastisitas. Dimana kesalahan pengganggu ε mempunyai varian yang sama, artinya $\text{var}(\varepsilon_i) = E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$ untuk semua $i, = 1, 2, \dots, n$. Asumsi tersebut disebut Homoskedastik. (J. Supranto, 2004:46)

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

1. Metode Grafik

Pengujian heterokedastisitas dengan melihat pola grafik. Jika grafik menunjukkan suatu pola tertentu maka dipastikan terkena penyakit heterokedastisitas dan jika grafik menunjukkan tersebar secara acak dan tidak membentuk pola maka dipastikan tidak terkena heterokedastisitas.

Dilihat dari scatter plot menunjukkan data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga dapat diduga dalam penelitian ini tidak ada masalah heterokedastisitas.



Gambar 4.4. Scatter Plot Pengujian Heterokedastisitas

(Sumber : Pengujian Model Grafik Eviews)

2. Metode Uji Glejser

Untuk menguji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan metode uji Glejser. Dimana nilai absolut residual digunakan sebagai variabel independen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_i \geq 0$ (Tidak ada masalah heteroskedastisitas)

$H_1 : \beta_i \leq 0$ (Ada masalah heteroskedastisitas)

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada masalah heterokedastisitas, begitupun sebaliknya. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti tidak terdapat heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian

dengan metode uji Glejser dengan bantuan Eviews 5.0 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.8. Pengujian Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Variabel	t_{hitung}	Kriteria	T_{tabel}	Heterokedastisitas
LPE	-1,208652	<	1,771	Tidak Ada
Upah	- 0,347127	<	1,771	Tidak Ada

Sumber : Pengujian Glejser Eviews

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai distribusi $t_{hitung} < t_{tabel}$, ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai terbebas dari masalah heteroskedastisitas pada tingkat signifikansi 5%.

3. Metode Uji White

Pengujian heteroskedastisitas selain dengan metode grafik dan uji Glejser juga dapat dilakukan dengan metode uji White. Berikut ini adalah hasil pengujian uji White dengan bantuan Eviews.

Dalam tabel 4.9 menunjukkan R^2 adjusted 0,51538. Jika nilai R^2 adjusted dikalikan dengan jumlah data (n) lebih kecil dari nilai χ^2_{tabel} maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dalam model empiris yang sedang estimasi adalah ditolak. Nilai R adjusted = $0,51538 \times 16 = 0,824608$ nilai χ^2_{tabel} dengan $df = 16-2=14$ sebesar 6,57. Maka dapat disimpulkan R^2 adjusted $< \chi^2_{tabel}$ berarti hipotesis yang menyatakan terdapat persolan heterokedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi adalah ditolak. Ini berarti dalam model estimasi tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4.9. Pengujian Heterokedastisitas dengan Metode White

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	1.163014	Probability	0.390772	
Obs*R-squared	5.883068	Probability	0.317764	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.32E+10	2.02E+10	-2.135335	0.0585
LPE	1.91E+10	8.96E+09	2.130742	0.0589
LPE^2	-2.11E+09	9.91E+08	-2.125860	0.0594
LPE*UPAH	461.2758	565.1557	0.816192	0.4334
UPAH	-2085.394	2589.188	-0.805424	0.4393
UPAH^2	-5.89E-05	8.45E-05	-0.696706	0.5019
R-squared	0.367692	Mean dependent var	4772214.	
Adjusted R-squared	0.051538	S.D. dependent var	5562269.	
S.E. of regression	5417040.	Akaike info criterion	34.12799	
Sum squared resid	2.93E+14	Schwarz criterion	34.41771	
Log likelihood	-267.0239	F-statistic	1.163014	
Durbin-Watson stat	1.381294	Prob(F-statistic)	0.390772	

Sumber: Pengujian White Eviews

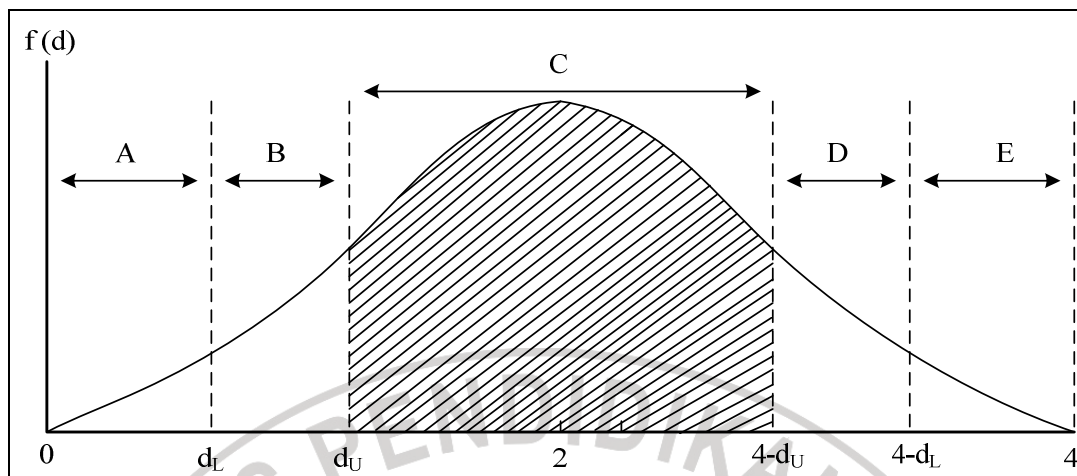
4.2.2.3. Uji Autokorelasi (Autokorelasi Test)

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Sedangkan asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain. Untuk mendeteksi adanya otokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Durbin Watson.

Tabel 4.10 Kriteria Pengujian Autokorelasi

Kriteria Pengujian	Masalah Autokorelasi
$d < d_L$	= terdapat masalah autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	= terdapat masalah autokorelasi positif lemah
$d_U < d < 4 - d_U$	= tidak terdapat masalah autokorelasi
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	= terdapat masalah autokorelasi negatif lemah
$4 - d_L < d$	= terdapat masalah autokorelasi negatif

Sumber: J.Supranto, 2004:105



Gambar 4.5. Statistik d Durbin-Watson

(Sumber : J. Supranto, 2004:104)

- Keterangan:
- A = tolak H_0 berarti ada autokorelasi positif
 - B = terdapat autokorelasi positif lemah
 - C = daerah terima H_0 yaitu tidak ada autokorelasi
 - D = terdapat autokorelasi negatif lemah
 - E = tolak H_1 berarti ada autokorelasi negatif

Dari persamaan hasil estimasi tabel 4.4 sebelumnya diperoleh nilai d_{hitung} sebesar 1,067901 untuk jumlah data sebanyak 16 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ diperoleh d_U sebesar 1,54 dan d_L 0,98 sebesar. Hasil uji autokorelasi dua sisi dengan kriteria $d_U < d < 4 - d_U$ agar terbebas dari masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini terkena autokorelasi lemah. Untuk memperbaikinya maka harus dilakukan perbaikan masalah autokorelasi dengan metode *Cochrane-Orcutt* untuk mendapatkan model yang terbebas dari masalah autokorelasi. *Cochrane-Orcutt* merekomendasikan untuk mengestimasi ρ dengan regresi yang bersifat iterasi

sampai mendapatkan nilai ρ yang menjamin tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model.

Tabel 4.11 Pengujian Autokorelasi dengan Metode Cochrane-Orcutt

Dependent Variable: NEWKK
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	127160.1	42819.54	2.969675	0.0117
NEWLPE	-26358.58	14816.19	-1.779039	0.1006
NEWUPAH	0.032676	0.004819	6.780734	0.0000
R-squared	0.793720	Mean dependent var		55486.58
Adjusted R-squared	0.759340	S.D. dependent var		3847.726
S.E. of regression	1887.583	Akaike info criterion		18.10084
Sum squared resid	42755652	Schwarz criterion		18.24245
Log likelihood	-132.7563	F-statistic		23.08667
Durbin-Watson stat	1.785367	Prob(F-statistic)		0.000077

Sumber : Pengujian Cochrane-Orcutt Eviews

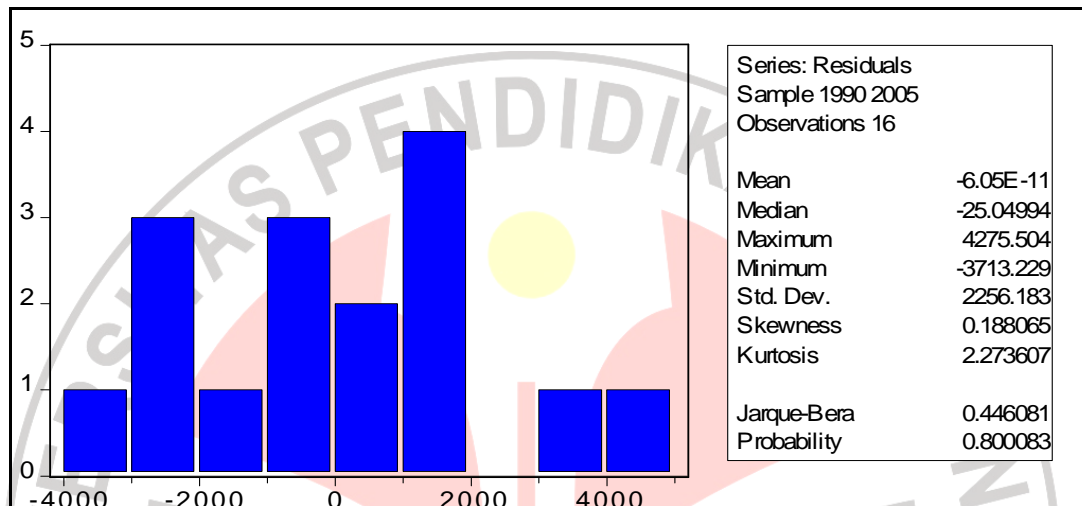
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11 diatas, diperoleh data d_w (d) sebesar 1,785367. Sedangkan nilai d_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ adalah untuk d_U sebesar 1,54 dan untuk d_L sebesar 0,98 dengan kriteria $d_U < d < 4 - d_U$, jika dimasukkan dalam kriteria tersebut yaitu $1,54 < 1,79 < 2,46$, maka dapat disimpulkan penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

4.2.3. Uji Normalitas dan Linearitas

4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Dan metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan metode Jarque-Bera (JB Test). Selanjutnya nilai $JB_{hitung} = \chi^2_{hitung}$ dibandingkan dengan χ^2_{tabel} . Dan kriterianya dalam Jarque-Bera yaitu :

- Jika $JB_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal ditolak.
- Dan sebaliknya jika $JB_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka H_1 diterima berarti residual berdistribusi normal diterima.



Gambar 4.6. Uji Normalitas Jarque-Berra
(Sumber : Pengujian Normalitas Jarque-Berra Eviews)

Berdasarkan gambar 4.5, nilai JB_{hitung} diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 JB_{hitung} &= \text{Nilai Skewness} + \text{Nilai Kurtosis} \\
 2,461672 &= 0,188065 + 2,273607
 \end{aligned}$$

Kemudian nilai JB_{hitung} dikalikan dengan jumlah variabel independen = 2 ,
($2,461672 \times 2 = 4,923344$) kemudian dibandingkan dengan χ^2_{tabel} dengan probabilitas 5% dan $df = 16-2=14$, diperoleh nilai sebesar 6,57. Karena nilai $JB_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, atau $4,923344 < 6,57$ maka H_1 diterima yang berarti residual berdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Linearitas (Linearity Test)

Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan uji MWD (Mackinnon, White Davidson). Uji MWD ini diperkenalkan oleh J. Mackinnon, H. White dan R. Davidson pada tahun 1983. Uji MWD ini bertujuan untuk menghasilkan t_{hitung} koefisien Z_1 dari bentuk model regresi linear dan untuk menghasilkan t_{hitung} koefisien Z_2 dari bentuk model regresi log-linear. Kemudian masing –masing t_{hitung} dari koefisien Z_1 dan Z_2 yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang mempunyai signifikansi $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$, $\alpha = 10\%$. Kriteria untuk uji linearitas dengan menggunakan uji MWD yaitu jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 menyatakan model penelitian linier diterima kemudian sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima dan artinya model penelitian linear ditolak. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode MWD diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.12 Pengujian Linearitas Dengan Metode MWD Untuk Koefisien Z1

Dependent Variable: KK Method: Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	142719.5	186973.0	0.763316	0.4589
LPE	-12474.67	41035.26	-0.303999	0.7659
Z1	-156684.3	88801.52	-1.723445	0.1011
R-squared	0.197890	Mean dependent var		85820.56
Adjusted R-squared	0.074488	S.D. dependent var		6277.200
S.E. of regression	6038.888	Akaike info criterion		20.41719
Sum squared resid	4.74E+08	Schwarz criterion		20.56205
Log likelihood	-160.3375	F-statistic		1.603624
Durbin-Watson stat	0.214955	Prob(F-statistic)		0.238518

Sumber: Pengujian Linearitas MDW Z1 Eviews

Dari tabel 4.12 diperoleh nilai t_{hitung} koefisien Z_1 adalah $-1,72$ sedangkan nilai t pada $\alpha = 5\% = -1,771$, maka dapat disimpulkan karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau

dapat ditulis $-1,72 < -1,771$, Z_1 tidak signifikan secara statistik melalui uji t sehingga H_1 menyatakan model penelitian linier diterima.

Tabel 4.13 Pengujian Linearitas dengan Metode MWD untuk Koefesien Z2

Dependent Variable: LOG(KK)
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.62660	3.358497	3.759598	0.0024
LOG(LPE)	-0.836792	2.214653	-0.377843	0.7116
Z2	2.11E-05	1.26E-05	1.678331	0.1171
R-squared	0.184934	Mean dependent var		11.35746
Adjusted R-squared	0.059539	S.D. dependent var		0.074068
S.E. of regression	0.071829	Akaike info criterion		-2.261688
Sum squared resid	0.067073	Schwarz criterion		-2.116828
Log likelihood	21.09351	F-statistic		1.474814
Durbin-Watson stat	0.199725	Prob(F-statistic)		0.264700

Sumber :Pengujian Linearitas MWD Z2 Eviews

Dari tabel 4.13 diperoleh nilai t_{hitung} koefesien Z_2 adalah 1,69 dan nilai $t_{tabel} = 1,771$. Maka model log-linear pun bisa diterapkan dalam penelitian ini.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

4.2.4.1. Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan pengujian satu sisi atau satu ujung, hal ini dilakukan karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sudah ditetapkan. Tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% atau tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$) pengujian hipotesis sebelah kanan dengan kriteria $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4.14. Pengujian Uji t

Variabel	t_{hitung}	$t_{tabel} = 1,771$	keputusan	Pengaruh
LPE	-2.785507	$> - 1,771$	Menolak H_0	Signifikan
UPAH	9.329846	$> 1,771$	Menolak H_0	Signifikan

Sumber: Pengujian estimasi Eviews

4.2.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel bebas. Kriteria pengujian F adalah jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi $= \alpha = 5\%$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh secara serempak atau secara bersama-sama dari keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan taraf keyakinan 95%, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh secara serempak atau secara bersama-sama dari keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.4 diperoleh $F_{hitung} = 43.81491$ kemudian F_{tabel} dengan $df=16-3=13$, maka diperoleh $F_{tabel} 3,81$. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau dapat ditulis $43,81491 > 3,81$, artinya menolak H_0 dan menerima H_1 yaitu dalam penelitian ini variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap Kesempatan kerja.

4.2.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sebagai alat ukur yang mengukur tingkat ketepatan (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yaitu merupakan proporsi atau presentase sumbangan X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) dinyatakan dengan R^2 . Besarnya nilai R^2 berada diantara 0 (nol) dan satu (1). (J. Supranto, 2005:159)

Berdasarkan hasil estimasi dalam tabel 4.4 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.870814 atau 87,0814 persen. Artinya LPE dan Upah dapat menjelaskan Kesempatan Kerja, sedangkan sebesar 12,9186 persen merupakan faktor lain yang tidak dapat diketahui. Dengan hasil R^2 sebesar 87,0814 ini berarti penelitian dianggap baik, karena jika nilai R^2 berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu) semakin mendekati 1 berarti model penelitian semakin baik.

4.3. PEMBAHASAN

4.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja

Hasil dari perhitungan statistik dengan regresi berganda menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar - 47009,93; hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan LPE maka akan menyebabkan penurunan pada kesempatan kerja dan sebaliknya jika terjadi penurunan LPE maka akan menyebabkan kenaikan pada kesempatan kerja. Jika terjadi peningkatan LPE sebesar 1% maka hal ini akan menunjukkan penurunan Kesempatan Kerja sebesar 47009 orang. Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa arahnya tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan,

seharusnya pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja mempunyai arah yang positif.

Ada beberapa alasan mengapa dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian menunjukkan hubungan yang negatif dan bertentangan dengan teori yang diajukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa teori-teori yang diajukan yaitu teori klasik dan teori keynes mengenai kesempatan kerja merupakan hasil dari pengamatan negara-negara barat dimana negara-negara tersebut lebih maju dan tentunya berbeda baik itu dari struktur perekonomiannya, tingkat kemajuannya ekonominya, waktu pada saat analisa dilakukan, dan kultur, sosial dan politik. Jadi teori-teori tersebut tidak bisa secara penuh diterapkan di Indoensia.

Pernyataan **Soeharsono Sagir** mendukung dalam peneltian ini menurutnya bahwa kelemahan perekonomian Indonesia adalah Pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak berkorelasi positif dengan kesempatan kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya menyerap kesempatan kerja paling banyak 300.000, hingga setiap tahun terjadi *carry over* yang makin besar. Kesempatan kerja produktif makin merosot. Artinya kesempatan kerja tidak memberikan imbal jasa/pendapatan yang mencukupi untuk hidup layak. Terjadi pemborosan ekonomi di tingkat mikro usaha, maupun di tingkat makro nasional/pemerintah (*high cost economy*). Penyebabnya tidak lain karena selama empat dasawarsa (1967-2005) Indonesia tidak berhasil untuk membangun ekonomi makro Indonesia, melalui pendekatan fundamental ekonomi makro kuat. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi makro kuat, prasyaratnya adalah: Pertumbuhan ekonomi

tinggi/GDP/GNP yang meningkat signifikan, minimal 3 kali dari pertumbuhan penduduk (6%/tahun); yang didukung oleh: perluasan kesempatan kerja, tidak terjadi *carry over* penganggur yang tidak terserap oleh pasar kerja/kenaikan GDP/GNP. Yang terjadi sekarang bukan saja *carry over* tenaga kerja yang tidak terserap, tetapi justru bertambah karena PHK atau makin meningkatnya angka pengangguran. Korelasi yang tidak positif antara pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja, dapat pula tercermin dari dukungan kemampuan pemerintah (fiskal) yang tidak terus menerus defisit, hingga makin tergantung pada utang luar negeri (memperbesar utang) ditambah menutup defisit dengan menjual kekayaan negara (aset negara); kemampuan sektor moneter (bank) sebagai lembaga intermediasi, memupuk modal (simpanan masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (perluasan kesempatan kerja artinya peningkatan pendapatan). Terjadi moral hazard atau penyimpangan dalam penyaluran kredit, terjadi penumpukan kredit macet/*non performance loan* (NPL). (<http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/022006/28/0901.htm>)

Penelitian yang dilakukan oleh **Suparman Zen Kemu dan R. Nurhidayat (2005)** yang berjudul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Indonesia**”, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1977-2003 mempunyai hubungan yang negatif dengan kesempatan kerja, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *pertama*, menurutnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih didukung oleh padat modal dan kurangnya investasi padat karya, hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi lebih didukung oleh pertumbuhan industri

(Investasi) dan rendahnya investasi padat karya ditandai dengan penciptaan kesempatan kerja yang rendah. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh *capital intensive* namun penciptaan kesempatan kerja tetap rendah kemudian setelah krisis dimana pertumbuhan ekonomi rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 3,8 persen sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja adalah 0,7 persen, Pada periode ini ekonomi Indonesia tumbuh tidak didukung dengan pertumbuhan industri (investasi) terutama yang padat karya (*labor intensive*), sehingga akibatnya kesempatan kerja yang rendah. *Kedua*, merosotnya sektor formal dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja. banyak pekerja yang awalnya berada di dalam sektor formal yang *under-utilized* beralih ke sektor informal. walaupun ekonomi dalam perkembangannya Indonesia sudah mulai tumbuh namun belum bisa mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat. Dan *ketiga*,. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih didukung pengeluaran konsumsi (C) dimana konsumsi adalah disposable income dikurangi saving, konsumsi dapat terus berlanjut walau investasi, dan net ekspor tidak tumbuh (stagnan) namun efeknya tidak begitu berperan terhadap penciptaan kesempatan kerja. Akan berbeda jika situasinya pertumbuhan ekonomi berasal dari pertumbuhan investasi (I)

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mempunyai hubungan yang positif dengan kesempatan kerja menurut **J.J. Sarungu (2004:8)** disebabkan ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyediakan kesempatan kerja adalah salah satunya adalah kurangnya investasi padat karya. Sebagaimana diketahui investasi merupakan penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, bagi

negara berkembang yang kelebihan penawaran tenaga kerja investasi yang perlu dilakukan adalah investasi padat karya. Namun dalam perkembangannya investasi yang dilakukan di Indonesia adalah kebanyakan padat modal. Banyak kajian ditunjukkan bahwa fenomena di negara sedang berkembang termasuk Indonesia cenderung menggunakan metode teknik produksi yang bersifat padat modal dalam berbagai sektor atau cenderung menggunakan teknologi hemat tenaga kerja (*labor saving technology*) dalam lingkungan dimana tenaga kerja melimpah. Hal ini dikarenakan secara aktual harga pasar tenaga kerja cenderung semakin mahal sedang harga pasar modal cenderung murah dibanding dengan kondisi kelangkaan sesungguhnya. Atau dengan perkataan lain, produsen lebih cenderung memilih metode teknik produksi yang bersifat padat modal karena hal itulah yang dipandang rasional dan ekonomis.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya didukung oleh investasi industri tidak akan efektif untuk menciptakan kesempatan kerja hal tersebut sesuai dengan pandangan **Sumitro Djojohadikusumo (1994:208)**, Penggunaan modal secara pukuk rata dengan menghemat pemanfaatan tenaga kerja dapat membawa hasil produksi yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun konsekuensinya ialah pertumbuhan ekonomi akan melampaui perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan produktif. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia ialah ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri disatu pihak dan dipihak lain perluasan kesempatan kerja produktif. Secara umum dapat

dikatakan bahwa di negara-negara berkembang, sektor industri berlangsung lebih cepat dengan 3-4 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Di negara berkembang sektor industri manufaktur dan sektor produksi sekunder pada umumnya hanya menyerap antara 10-15 persen dari seluruh angkatan kerja. sebaliknya di negara industri jumlah tenaga kerja berkisar 30-35 persen dari angkatan kerja.

Ninasapati Triaswati (2005) didalam jurnalnya “Industrialisasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Untuk Siapa?”, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia (1990-1996) tidak menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang besar, demikian pula perumbuhan ekonomi yang rendah (2002-2003), juga tidak menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang besar. Hal ini dikarenakan pengembungan sektor usaha padat modal dimana yang mengurangi penyerapan pekerja lebih kecil daripada sektor usaha padat karya walaupun dari sisi pertumbuhan PDB akan lebih tinggi selain itu memburuknya kondisi lapangan kerja disektor formal karena berbagai perusahaan lari terutama perusahaan asing dari Indonesia ke negara lain dan berbagai perusahaan dalam negeri mengalami kebangkrutan seperti tekstil dan sepatu karena bersaing dengan RRC atau negara kawasan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia pada periode 1990-1996 menghasilkan tambahan lapangan kerja yang tidak jauh berbeda dengan pada saat pertumbuhan ekonomi rendah dalam periode 2002-2003 temuan ini berbeda dengan berbagai pernyataan dalam perekonomian bahwa jika pertumbuhan ekonomi cukup tinggi maka akan terjadi penciptaan lapangan kerja yang tinggi pula.

Menurut **Prijono Tjptoherijanto (2001)**, perpindahan struktur corak ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri penyebab pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dengan kesempatan kerja dimana penambahan PDB dari sektor pertanian berkurang dan pekerjaan padat modal juga berkurang. Sektor pertanian yang merupakan penyerap tenaga kerja padat karya namun pada kenyataannya adanya penurunan presentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sebaliknya terjadi peningkatan presentase penduduk yang bekerja disektor non pertanian utamanya sektor industri. Perpindahan corak tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan kehidupan petani, juga karena makin meningkatnya pengetahuan penduduk disektor pertanian keadaan ini mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerjaan sebagai petani, pekerjaan disektor industri dan jasa dianggap lebih mempunyai daya tarik karena lebih modern. Dalam perkembangannya memang jasa dan industri memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, dimana meningkatnya elastisitas kesempatan kerja pada salah satu sektor industri yaitu industri pengolahan tahun 1980-1985 menjadi 2,52 pada tahun 1993-1994. Sayangnya kondisi seperti tersebut tidak berlangsung lama dimulai krisis moneter sektor industri banyak yang bangkrut dan banyak pemutusan hubungan kerja dan sampai tahun terakhir daya kompetisi sektor industri dengan negara lain masih jauh tertinggal dimana ditandai meningkatnya impor barang-barang dari luar negeri yang lebih berkualitas dan lebih murah.

Selama kurun waktu 1990-1997, tenaga kerja sektor bukan pertanian meningkat lebih dari 16,5 juta orang, sebaliknya tenaga kerja di sektor pertanian, barangkali untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, turun lebih dari 6,7 juta

orang. Pertambahan tenaga kerja bukan pertanian mencolok di sektor perdagangan, jasa, industri dan konstruksi. Selama kurun waktu itu, tenaga kerja bukan pertanian secara keseluruhan tumbuh sekitar 6,0 persen per tahun. **(Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004 – 2009, Depnakertrans)**

Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif dengan kesempatan kerja, hal ini juga dikarenakan kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih didukung oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang seharusnya untuk menciptakan kesempatan kerja pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh investasi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak mampu menyerap tenaga kerja. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di lebih didorong pertumbuhan konsumsi, dan tak banyak menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, kontribusi investasi dan ekspor mulai melampaui kontribusi konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru pada triwulan ketiga tahun 2004. Tentunya kemampuan investasi dan ekspor yang relatif baru masih terbatas untuk menciptakan lapangan kerja. **(M Chatib Basri, Media Indoensia, 11 juli 2004)**

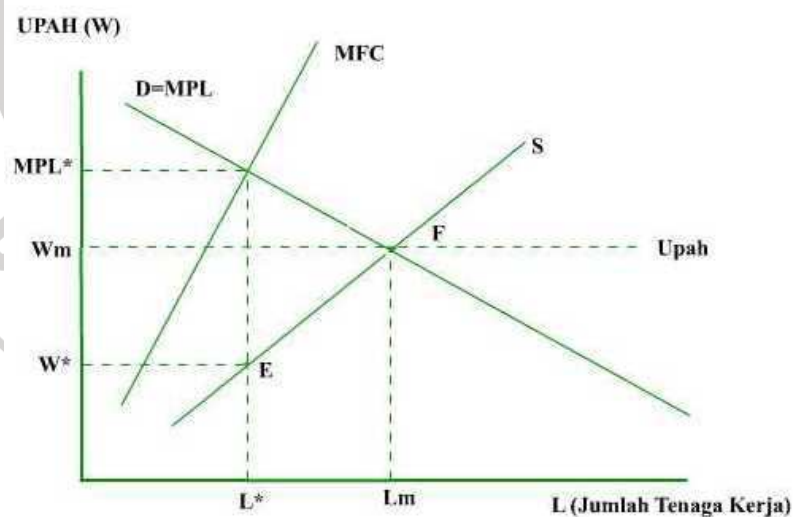
4.3.2 Pengaruh Upah Terhadap Kesempatan Kerja

Koefisien upah menunjukkan nilai sebesar 0,037892; hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan upah tenaga kerja, maka akan menaikkan kesempatan kerja. Jika terjadi peningkatan upah sebesar Rp. 1 (Satu Rupiah) maka akan menaikkan Kesempatan Kerja sebesar 0,37892 orang. Dalam penelitian ini menunjukkan upah mempunyai hubungan yang positif terhadap kesempatan kerja.

Dari hasil tersebut jelas menunjukkan bahwa berbeda dengan hipotesis yang diajukan dimana upah seharusnya mempunyai hubungan negatif dengan kesempatan kerja. Penjelasan yang dapat menjawab fenomena tersebut yaitu dengan melihat struktur pasar kerja di Indonesia.

Struktur pasar kerja Indonesia menunjukkan pasar kerja **Monopsonistik**, dimana jumlah pembeli jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penjual, akibatnya, kekuatan pembeli menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan penjual. Pasar kerja Monopsonistik juga merupakan dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum. (Edy Priyono, 2002)

Pasar Monopsonistik menunjukkan jika upah dan kesempatan kerja mempunyai hubungan yang positif untuk menggambarkan hubungan tersebut dapat dilihat dari kurva dibawah ini.



Gambar 4.7. Kurva Upah Di Pasar Tenaga Kerja Monopsonistik
(sumber : Sadono Sukirno, 2002:362)

Dalam gambar 4.7 kurva S adalah kurva penawaran tenaga kerja dan tingkat upah, yaitu disatu pihak kurva S menggambarkan besarnya upah pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja, dan dilain pihak menggambarkan jumlah penawaran tenaga kerja pada berbagai tingkat upah. Kurva MFC (*Marginal Factor Cost*) adalah kurva biaya marginal tenaga kerja. kurva MFC akan selalu terletak di atas kurva S dan semakin lama semakin menjauhi kurva S. Hal ini dikarenakan kurva MFC mempunyai sifat yang *pertama*, biaya marginal tenaga kerja selalu lebih besar dari tingkat upah dan *kedua*, perbedaan di antara upah dengan biaya marginal tenaga kerja semakin lama semakin besar. Kemudian kurva D identik dengan kurva MPL (*Marginal Productivity of labor*), yang menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja dan hasil penjualan produksi marginal. (Sadono Sukirno, 2002:362)

Keseimbangan akan terjadi dititik E, yakni $MFC=MPL$. Pada titik ini upah buruh adalah sebesar W^* , sedangkan kesempatan kerja adalah sebanyak L^* . Terlihat disini, bahwa kondisi L^* , tingkat produktivitas buruh adalah MPL^* yang lebih tinggi dari W^* . Ini berarti, dalam keseimbangan pasar tenaga kerja yang monopsonistik, buruh dibayar lebih rendah dibandingkan produktivitasnya. Selisih antara produktivitas buruh dengan upah yang diterima ini sering disebut sebagai eksploitasi. Dalam kondisi demikian, mengapa pemerintah mempunyai alasan untuk menetapkan kebijakan upah minimum, dalam hal ini upah pada W_m . Dengan kebijakan ini, keseimbangan akan bergeser dari E ke F. Dengan mudah bisa dilihat, bahwa upah akan naik dari W^* ke W_m , dan penyerapan tenaga kerja juga akan naik dari L^* ke L_m . Jelas dalam pasar monopsonistik upah berdampak

positif terhadap kesempatan kerja. Pasar tenaga kerja Monopsonistik ini merupakan dasar pemerintah memberlakukan upah minimum di Indonesia. (**Edy Priyono, 2002**)

Penelitian yang dilakukan oleh **Edy Priyono (2002)** yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul *Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum*, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia cenderung bersifat Monopsonistik, hal ini dikarenakan bahwa jumlah lapangan pekerjaan (formal) yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. dan diperkuat dengan indikasi di lapangan yang memperlihatkan kekautan rebut- tawar (*Bargaining power*) pengusaha yang lebih cenderung besar dibandingkan dengan kekuatan buruh, dimana pada kenyataannya menunjukkan kekuatan pekerja atau buruh yang semakin besar yang ditandai oleh kekuatan serikat buruh, tetapi secara umum tetap lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan pengusaha. (**Edy Priyono, 2002**)

Tabel 4.15 memperlihatkan bahwa di Indonesia mempunyai struktur pasar tenaga kerja yang monopsonistik, dimana pembeli dalam hal ini pengusaha lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penjual atau pekerja. Yang artinya jumlah pencari pekerja lebih banyak dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia.

Tabel 4.15 Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja Periode Tahun 1990-2005

Tahun	Pencari Kerja	Lowongan Kerja	Pemenuhan Tenaga Kerja
1990	1.217.148	227.339	167.346
1991	1.238.717	272.965	198.883
1992	1.324.681	301.553	282.357
1993	1.324.681	301.553	282.357
1994	1.213.018	364.240	327.852
1995	1.198.551	462.257	398.300
1996	1.497.159	629.164	527.248
1997	1.542.522	593.153	492.705
1998	1.542.522	593.153	492.705
1999	1.240.562	561.609	485.178
2000	1.191.750	475.260	395.214
2001	975.215	388.058	320.758
2002	343.205	102.906	85.697
2003	427.525	132.231	61.047
2004	418.773	97.801	75.816
2005	382.706	167.724	141.277

Sumber : Statistik tenaga kerja, BPS

Dari penjelasan mengenai pasar monopsonistik, jelas memang upah mempunyai korelasi positif dengan kesempatan kerja, dimana jika upah naik maka kesempatan kerja juga naik dan sebaliknya jika upah turun maka kesempatan kerja juga akan mengalami penurunan. Walaupun naiknya kesempatan kerja tersebut bersifat sementara, terbatas, dan naiknya upah yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah melalui UMP tersebut masih kecil oleh pekerja karena tidak sesuai dengan produktivitasnya atau adanya eksploitasi. Namun kenyataan pekerja tidak mempunyai kekuatan yang cukup dibandingkan dengan para pengusaha yang mempekerjakan mereka, dalam hal ini pekerja tidak mempunyai pilihan selain menerima upah yang diberikan oleh pengusaha yang terpenting bagi pekerja di Indonesia mempunyai pekerjaan. Jikalau ada yang dapat menawar upah kepada pengusaha itu hanya untuk pekerja kerah putih yang mempunyai

pendidikan dan kualitas produktivitas yang tinggi serta tentunya yang sudah mempunyai nilai jual SDM yang tinggi dan itupun di Indonesia jumlahnya terbatas. Karena di Indonesia kebanyakan pekerja yang mempunyai pendidikan yang rendah.

Situasi ketenagakerjaan yang mengarah pasar tenaga kerja yang monopsonistik, Menurut **J. Supranto (2001)** tingginya supply tenaga kerja apalagi kenyataan tidak dapat terserap seluruhnya dalam kegiatan ekonomi akan berdampak pada penurunan tingkat upah, sehingga rendahnya kesempatan kerja akan menyebabkan terbatasnya penduduk yang dapat memasuki pasar kerja.

4.4. IMPLIKASI PENDIDIKAN

Kesempatan kerja yang tinggi merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh negara Indonesia. Dimana dengan kesempatan kerja yang tinggi, masyarakat dapat bekerja dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Namun kesempatan kerja yang tinggi jika dilihat dari kuantitas saja, tidak akan membantu pembangunan Indonesia yang sedang membangun ini. Maka untuk itu diperlukan suatu kesempatan kerja yang berkualitas.

Kesempatan kerja yang berkualitas diperlukan karena situasi pasar tenaga kerja global ini menuntut keluaran tenaga kerja yang dapat berkompetisi dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Tuntutan tersebut saat ini harus dipenuhi karena jika tidak Indonesia akan tertinggal oleh negara lain. Dengan kesempatan kerja yang berkualitas juga akan berdampak kepada tenaga kerja, dimana adanya penghargaan lebih yaitu memperoleh penghasilan yang tinggi dan dengan

kesempatan kerja yang berkualitas akan membantu menambah tenaga kerja di sektor formal.

Untuk mencapai kesempatan kerja yang berkualitas dan mempunyai kuantitas yang tinggi diperlukan suatu peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan salah satu cara yang paling efektif yaitu melalui pendidikan. Meningkatkan taraf pendidikan yang tinggi merupakan suatu tugas yang harus dilakukan pemerintah saat ini, mengingat banyaknya tenaga kerja yang hanya lulusan di bawah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan masih kurang.

Tabel. 4.16. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Umur

Tahun	SD Kebawah	SLTP	SLTA	DIPLOMA	Universitas
1990	105.586.397	15.727.360	12.662.441	1.043.627	692.623
1993	30.024.890	8.608.487	9.651.436	1.004.296	911.433
1996	58.766.702	10.685.351	13.283.620	1.482.956	1.483.184
1999	84.028.406	26.402.851	25.687.307	2.346.925	2.630.948
2001	58.308.595	16.850.250	18.746.960	2.237.941	2.668.702
2003	82.697.848	35.282.963	29.282.390	2.363.024	3.023.693
2005	53.391.298	18.558.633	17.848.498	2.173.223	2.976.561

Sumber: Statistik Indonesia, Ketenagakerjaan, BPS.

Dari tabel 4.21 terlihat bahwa angkatan kerja didominasi oleh angkatan kerja yang pendidikannya di bawah SD. Sedangkan angkatan kerja yang lulusan Diploma dan Universitas hanya sedikit dibandingkan lulusan SD. Ini menunjukkan dari segi kualitas Indonesia masih kurang mempunyai SDM yang berkualitas. Sedangkan kebutuhan pasar tenaga kerja lebih banyak menuntut dengan kualitas pendidikan yang tinggi, keterampilan dan kemampuan yang tinggi serta etos dan produktifitas yang tinggi, sehingga timbul ketidaksesuaian antara

permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja yang begitu banyaknya didominasi di bawah SLTA.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa di satu pihak kebutuhan tenaga kerja terampil golongan menengah dan keahlian sarjana masih belum teratasi sementara penawaran kelas tenagakerja tersebut justru berlebih. Besar kemungkinan ini disebabkan adanya gap yang serius antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Karena itu sangat mendesak perencanaan tenaga kerja yang mengaitkan dunia pendidikan dan pasar kerja.

Sebagai perbandingan, dengan Malaysia dan Amerika Indonesia dari segi kualitas tenaga kerja berbeda jauh itu dapat Pada tahun 1998, angkatan kerja Indonesia mencapai 93 juta orang. Sekitar 63 persen berpendidikan SD ke bawah, sekitar 33 persen menengah dan 4 persen perguruan tinggi. Sebagai perbandingan, angkatan kerja Malaysia pada tahun 1990 sekitar 48 persen berpendidikan SD ke bawah, 48 persen menengah serta 5 persen diploma/universitas. Dibanding Amerika Serikat, kita masih tertinggal cukup jauh. Sebanyak 13 persen angkatan kerja pada tahun 1990 berpendidikan SLTA ke bawah, 39 persen SLTA, 21 persen diploma/akademi dan 27 persen sarjana/universitas. (Elwin Tobing, *The Prospect Labor Unemployment*, 2002)

Tabel 4.17. Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Di Indonesia, Malaysia Dan Amerika Serikat

Pendidikan	Indonesia			Malaysia	AS
	1985	1990	1998	1990	1990
SD ke bawah	82,9	78,4	63,2	70,0	
SLTP	8,0	9,6	14,2	11,2	
SLTA	7,8	10,2	18,4	48,3	39,4
Akademi	0,8	1,1	2,0		
Universitas	0,5	0,7	2,2	5,2	26,5

Sumber: *The Prospect Labor Unemployment*, BPS

Dari gambaran kualitas pendidikan angkatan kerja Indonesia maka dibutuhkan penanganan yang serius masalah pendidikan ini. Yaitu dengan meningkatkan taraf pendidikan angkatan kerja. Kenyataan di Indonesia pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang dianggap masih mahal karena di Indonesia masih banyak penduduk miskin dan rendah pendapatannya yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga kebutuhan pendidikan masih terabaikan dan tidak terjangkau untuk sebagian penduduk di Indonesia, terutama, penduduk dengan ekonomi menengah kebawah.

Masih banyaknya penduduk yang masih belum merasakan pendidikan hal ini dikarenakan mahalnya pendidikan di Indonesia, sebab itu perlu dilakukan penambahan anggaran pendidikan untuk menyediakan sekolah gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Indonesia memang terus meningkat, tetapi secara persentase masih sekitar 10 persen, lebih kecil dibanding dengan negara industri baru seperti Malaysia dan Korea Selatan yang alokasi anggaran pendidikannya rata-rata mencapai 20 persen. Demikian pula dari sudut GNP, periode 1968-1993, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan ternyata secara rata-rata di bawah 2.5 persen, dibandingkan Malaysia dan Singapura masing-masing 10 persen dan 5 persen. (Elwin Tobing, *The Prospect Labor Unemployment*, 2002)

Menaikkan anggaran pendidikan, pemerintah dalam rangka meningkatkan pendidikan hal yang dilakukan adalah mengadakan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat terutama keterampilan yang bisa menjadikan masyarakat dapat berwirausaha dan mandiri serta dapat menciptakan lapangan

pekerjaan. Misalnya, perbengkelan, kerajinan rotan, tata boga. Kemudian keterampilan dan pelatihan juga ditekankan agar bisa dapat menggali potensi wilayah masing-masing sehingga, dapat menciptakan kesempatan kerja di wilayah sendiri, jika hal itu terjadi di seluruh wilayah di Indonesia maka akan sangat membantu bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Dan secara agregat akan membantu pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan di Indonesia untuk mendukung naiknya pertumbuhan ekonomi yang pro kesempatan kerja, maka harus pendidikan yang menekankan sejak dini untuk berwiraswasta, dan pendidikan yang dapat diaplikasikan secara langsung didalam dunia kerja. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peran Investasi dalam bentuk PMA dan PMDN. Dan biasanya tuntutan PMA dan PMDN yaitu menginginkan tenaga kerja yang ahli dan profesional terutama PMA. Untuk dapat investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja maka harus dapat memberdayakan tenaga ahli dalam negeri. Dan untuk diperlukan tenaga yang berkualitas dan ahli, sehingga Indonesia tidak harus mendatangkan tenaga kerja asing. Dan untuk mewujudkannya yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Sehingga potensi-potensi SDM yang berkualitas dapat lebih berkualitas lagi dan mampu bersaing dengan negara lain. Dan perlu titekankan juga dalam pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja perlu investasi yang lebih bersifat padat karya dan teknologi yang digunakan jika bisa teknologi yang dapat seimbang dengan kemampuan tenaga kerja di Indonesia, dan teknologi yang masih menggunakan tenaga manusia.

Seiringnya meningkatnya kualitas kesempatan kerja maka, akan berdampak pada penghargaan yaitu dengan memperoleh upah yang tinggi, dan upah yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Maka perlu diupayakan kualitas tenaga kerja yang bisa berkompetitif sehingga pekerja di Indonesia akan di hargai sesuai dengan produktifitasnya dan tidak adanya eksploitasi di dalam pasar tenaga kerja monopsonistik. Dengan kualitas tenaga kerja yang tinggi akan menjamin kepastian kerja serta pendapatan yang tinggi, yang pada akhirnya akan membantu perekonomian bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan modal dasar bagi negara yang ingin menciptakan perekonomian yang tinggi dan merupakan modal untuk menciptakan pembangunan negara sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju sehingga dapat mengejar ketinggalan dan mengangkat keterpurukan kondisi ketenagakerjan di Indonesia.